

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melalui penafsiran teleologis/sosiologis, pengaturan terhadap penolakan vaksinasi Covid-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang memuat sanksi pidana bagi penolak vaksinasi Covid-19 yang berlaku di sejumlah daerah di Indonesia. Penafsiran teleologis digunakan sebab penafsiran teleologis ialah penafsiran yang melihat maksud dan tujuan dari suatu undang-undang. Namun, secara eksplisit rumusan sanksi pidana terhadap penolakan vaksinasi Covid-19 telah tercantum dalam sejumlah peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Daerah (Perda), sehingga tidak menggunakan penafsiran hukum interpretasi teleologis/sosiologis.
2. Penolakan vaksinasi tidak tepat dikualifikasi sebagai tindak pidana. Seseorang yang sengaja menolak vaksinasi Covid-19 pada umumnya tidak dilingkupi dengan *mens rea*. Seseorang menolak vaksinasi Covid-19 dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai efektivitas vaksin Covid-19 kepada masyarakat hingga dipengaruhi oleh berita bohong (*hoax*). Kemudian selanjutnya dalam menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana atau disebut juga sebagai kriminalisasi, maka perbuatan tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria kriminalisasi yang sudah ditentukan. Perbuatan menolak vaksinasi Covid-19 juga tidak memenuhi beberapa kriteria kriminalisasi seperti penggunaan hukum pidana yang harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*) dan penggunaan hukum pidana yang harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dan badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas

(*overbelasting*). Lalu, perbuatan menolak vaksinasi Covid-19 yang diancam dengan sanksi pidana juga bertentangan dengan salah satu asas kriminalisasi yaitu asas subsidiaritas, yakni prinsip *ultimum remedium* yang terdapat dalam hukum pidana, yang bermakna bahwa hukum pidana sebaiknya digunakan ketika sarana hukum lain tidak memadai. Keengganan masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 masih dapat ditanggulangi dengan pemerintah gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya non-penal. Terakhir, penggunaan sarana hukum pidana terhadap penolak vaksinasi Covid-19 tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berkembang saat ini. Tujuan pemidanaan seakan hanya pembalasan, padahal masa kini tujuan pemidanaan berkembang untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perbuatan menolak vaksinasi Covid-19 tidak tepat dikualifikasi sebagai tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana.

5.2 Saran

1. Pemerintah pusat sebaiknya mencabut Pasal 13B Perpres No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang secara implisit terdapat muatan sanksi pidana terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi, sedangkan Pemerintah Daerah sebaiknya mencabut Peraturan Daerah (Perda) yang memiliki muatan sanksi pidana terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi. Adapun pemberian sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak vaksinasi harus mempertimbangkan prinsip *ultimum remedium*, artinya hukum pidana harus digunakan sebagai sarana penegakan hukum yang terakhir bagi pemerintah. Hukum pidana harus digunakan dengan hati-hati, sebab hukum pidana bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, hukum pidana melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Di sisi lain, hukum pidana memberikan nestapa bagi pelaku kejahatan. Adapun menolak vaksinasi Covid-19 tidak tepat dikualifikasi sebagai tindak pidana, baik berbentuk kejahatan maupun pelanggaran. Pemerintah harus terlebih dahulu mengutamakan pemberian sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat sampai ke daerah

3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) terkait program vaksinasi Covid-19 dengan melibatkan berbagai pihak, terutama tenaga kesehatan yang secara khusus memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai vaksinasi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2020, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Anies, et al., 2021, Bunga Rampai Covid-19 Tinjauan Covid-19 dari Aspek Kesehatan, Ekonomi, dan Hukum, Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Atikah Proverawati dan Citra Setyo Dwi Andhini, 2017, Imunisasi dan Vaksinasi, Yogyakarta: Nuha Offset
- Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Yogyakarta: Genta Publishing
- _____, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung:Citra Aditya Bakti
- _____, 2016, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, 2016, Perbandingan Sistem Hukum Pidana, Bandung: Pustaka Setia
- C.S.T Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka
- Djisman Samosir, 2002, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia, Jakarta:Putra Bardin
- _____, 2016, Penologi dan Pemasarakatan, Bandung: Nuansa Aulia
- Djoko Prakoso, 1984, Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktik Peradilan, Jakarta: Ghalia
- _____, 1987, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Yogyakarta:Liberty
- Dwidja Priyatno, 2013, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: PT.Refika Aditama
- Eddy O.S, 2015, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Elisabeth Nurhaini, 2018, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Refika Aditama
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, Hukum & Kriminologi, Lampung:CV Anugerah Utama Raharja
- Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Tangerang: PT.Nusantara Persada Utama
- Frans Maramis, 2016, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Depok: PT.RajaGrafindo Persada
- Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta:Sinar Grafika
- Moeljatno, 2015, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta
- Muntaha, 2017, Hukum Pidana Malapraktik (Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana), Jakarta:Sinar Grafika

- P.A.F.Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 2019, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung:Nuansa Aulia
- R. Abdoel Djamali, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok:RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Pers
- Sri Herlina dan Mustafa Lutfi, 2019, *Kesehatan Masyarakat*, Malang:Intimedia
- Sukendar dan Aris Prio Agus Santoso, 2019, *Tindak Pidana Dalam Praktik Keperawatan Mandiri (Perlindungan Hukum Bagi Perawat dan Pasien)*, Yogyakarta: Nuha Medika

Jurnal

- Aras Firdaus dan Rudy Hendra Pakpahan, *Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19*, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 50 No. 2, 2020
- Arif Firmansyah dan Euis Suhardiman, *Membangun Politik Kriminal Pada Pertambangan Batubara Yang Menyejahterakan Masyarakat Melalui Sarana Non-Penal*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 3, 2015
- Ayu Nur Syahbani dan Kusnarto, *Persepsi Masyarakat Surabaya Terhadap Isi Pemberitaan Persyaratan Perjalanan Dalam Negeri Pada Masa Pandemi di Media Online*, *Jurnal Representamen*, Vol. 8 No. 2
- Edo Bintang, *Analisis Ketidadaan Niat (Mens Rea) dalam Pidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/PN.JKT/PST*, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No. 2, Desember 2021
- Farina Gandryani, *Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 1, April 2021
- Gede Erlangga Gautama dan I Wayan Didik Prayoga, *Pengenaan Sanksi Pidana Penolakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 10, 2021
- Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pidanaan*, *Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 1, Februari 2009
- Nur Ainiyah Rahmawati, *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium*, *Jurnal Recidive*, Vol. 2 No. 1, 2013
- Olivia J. Lintiuwulang, *Penegakan Hukum Terhadap Pihak Yang Menolak Vaksinasi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, No. 12, 2021
- Prianter Jaya Hairi, *Kriminalisasi Terhadap Tindakan Hakim Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.5, No.1, Juni 2014

- Regar Saputra, *Analisa Yuridis terhadap Masyarakat yang Menolak Vaksinasi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Ditinjau dari Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 10, No. 2, 2022
- Rosalind Angel Fanggi, *Kebijakan Kriminalisasi Pengguguran Kandungan Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Law Reform, Vol. 7, No. 2, Oktober 2012
- Salman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 16, Januari 2009
- Syarwan Ichromy Kabalmay, *Tinjauan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19 di Masa Pandemic Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 2, Agustus 2021

Sumber Internet

- Aditya Jaya Iswara, *Carina Joe, Ilmuwan Indonesia Salah Satu Pemilik Hak Paten Vaksin AstraZeneca*, <https://www.kompas.com/global/read/2021/07/31/144800470/carina-joe-ilmuwan-indonesia-salah-satu-pemilik-hak-paten-vaksin?page=all> (diakses pada tanggal 25 Mei 2022)
- Ameidyo Daud, *Survei LSI: 36% Masyarakat Tak Mau Terima Vaksin Covid-19*, <https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/60f4dbf9a9642/survei-lsi-36-masyarakat-tak-mau-terima-vaksin-covid-19> (diakses pada tanggal 17 Juni 2023)
- Andi Priyatno Utomo, *WHO Umumkan Virus Corona sebagai Pandemi Global*, <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=all> (diakses pada tanggal 24 Mei 2022)
- Ardito Ramadan, *Wamenkumham: Menolak Vaksinasi Covid-19 Bisa Dipidana*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/11/08572481/wamenkumham-menolak-vaksinasi-covid-19-bisa-dipidana?page=all>, (diakses pada 15 Maret 2023)
- Chuck Shatu, *Termakan Hoaks, Dosis ke-2 Vaksinasi Remaja di Bondowoso Hanya 5 Orang*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5661417/termakan-hoaks-dosis-ke-2-vaksinasi-remaja-di-bondowoso-hanya-5-orang> (diakses pada tanggal 14 Juni 2023)
- CNN Indonesia, *Habis PSBB Terbitlah PPKM, Apa Bedanya?*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210108070438-20-590992/habis-psbb-terbitlah-ppkm-apa-bedanya/1> (diakses pada tanggal 24 Mei 2022)
- CNN Indonesia, *Ribka Tjiptaning, Orang Pertama Menolak Vaksin Di Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210113074635-32-592938/ribka-tjiptaning-orang-pertama-menolak-vaksin-di-indonesia> (diakses pada 28 November 2022)
- Dani Prabowo, *Menkes Targetkan Vaksinasi bagi Semua Penduduk Indonesia Dimulai Akhir April*,

- <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/30/12322551/menkes-targetkan-vaksinasi-bagi-semua-penduduk-indonesia-dimulai-akhir-april> (diakses pada tanggal 25 Mei 2022)
- Ekarina, *Virus Corona Meluas, WHO Tetapkan sebagai Pandemi Global*, <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a421554dfe/virus-corona-meluas-who-tetapkan-sebagai-pandemi-global> (diakses pada tanggal 24 Mei 2022)
- Enggar Furi, *Vaksin dan Pandemi Covid-19*, <https://fpscs.uui.ac.id/blog/2020/12/28/vaksin-dan-pandemi-covid-19/> (diakses pada 15 Maret 2023)
- Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Dosen University of Canberra berikan kuliah tamu di Fakultas Hukum*, <https://hukum.ub.ac.id/dosen-university-of-canberra-berikan-kuliah-tamu-di-fh-2/> (diakses pada 28 November 2022)
- Fitria Chusna Farisa, *Epidemiolog Sebut PPKM Diperlukan Selama Pandemi Covid-19 Masih Terjadi*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/13/12570581/epidemiolog-sebut-ppkm-diperlukan-selama-pandemi-covid-19-masih-terjadi?page=all>. (diakses pada tanggal 25 Mei 2022)
- _____, *Jokowi: Saya Tegaskan, Vaksin Covid-19 yang Akan Digunakan Terbukti Aman*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/10/20172541/jokowi-saya-tegaskan-vaksin-covid-19-yang-akan-digunakan-terbukti-aman> (diakses pada 28 November 2022)
- Institute For Criminal Justice Reform, *ICJR Minta Agar Pemerintah Pusat dan Daerah Tinjau Ulang Ketentuan Pidana untuk Perbuatan Menolak Vaksin*, <https://icjr.or.id/icjr-minta-agar-pemerintah-pusat-dan-daerah-tinjau-ulang-ketentuan-pidana-untuk-perbuatan-menolak-vaksin/>, (diakses pada tanggal 15 Maret 2023)
- KBBI daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anafilaksis> (diakses pada tanggal 30 Juni 2023)
- KBBI daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/imunodefisiensi> (diakses pada tanggal 30 Juni 2023)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *4 Manfaat Vaksin Covid-19 yang Wajib Diketahui*, <https://upk.kemkes.go.id/new/4-manfaat-vaksin-covid-19-yang-wajib-diketahui#:~:text=Mengurangi%20Risiko%20Penularan,virus%20dan%20mengurang%20risiko%20terpapar>. (diakses pada 17 Mei 2022)
- Luthfia Ayu Azanella, *Beberapa Wilayah Dunia yang hingga 2022 Masih Bebas Kasus Covid-19*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/15/140500265/beberapa-wilayah-dunia-yang-hingga-2022-masih-bebas-kasus-covid-19-?page=all> (diakses pada tanggal 24 Mei 2022)
- Matus Alfons, *Survei Median Ungkap 45,7% Responden Tolak Divaksinasi, Ini Alasannya*, <https://news.detik.com/berita/d-5716489/survei-median-ungkap>

- 457-responden-tolak-divaksinasi-ini-alasannya (diakses pada tanggal 9 Juni 2023)
- Nirmala Maulana, *Puskesmas Ciracas Gelar Vaksinasi untuk ODGJ, Ada Pasien yang Menolak hingga Kabur*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/12/13405901/puskesmas-ciracas-gelar-vaksinasi-untuk-odgj-ada-pasien-yang-menolak> (diakses 16 Mei 2023)
- Nurhadi Sucahyo, *Wamenkumham: Penjara Penuh, Pidana Penolak Vaksin Jadi Opsi Terakhir*, <https://www.voaindonesia.com/a/wamenkumham-penjara-penuh-pidana-penolak-vaksin-jadi-opsi-terakhir/5741553.html> (diakses pada tanggal 31 Maret 2023)
- Nursita Sari, *Ini Arahan Lengkap Anies Terkait PSBB Jakarta Mulai Jumat, 10 April*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/08/06000041/ini-arahan-lengkap-anies-terkait-psbb-jakarta-mulai-jumat-10-april?page=all> (diakses pada tanggal 24 Mei 2022)
- Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, *Revisi – Rekomendasi PAPDI tentang Pemberian Vaksinasi Covid-19*, <https://www.papdi.or.id/berita/info-papdi/1077-revisi-rekomendasi-papdi-tentang-pemberian-vaksinasi-covid-19>, (diakses pada tanggal 29 Juni 2023)
- Rakhmat Nur Hakim, *Jokowi Minta Sektor Kesehatan Diutamakan Dibanding Pemulihan Ekonomi*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/07/10533031/jokowi-minta-sektor-kesehatan-diutamakan-dibanding-pemulihan-ekonomi> (diakses pada tanggal 25 Mei 2022)
- Rehia Sebayang, *WHO Nyatakan Wabah COVID-19 jadi Pandemi, Apa Maksudnya?*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya> (diakses pada tanggal 24 Mei 2022)
- Rofiq Hidayat, *Mengenali Beragam Jenis Pidana Tambahan dalam KUHP Baru*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-beragam-jenis-pidana-tambahan-dalam-kuhp-baru-lt6391ba66673ce/?page=1> (diakses pada tanggal 5 April 2023)
- Satuan Gugus Tugas Penangan Covid-19, *Protokol Kesehatan Yang Diperkuat Vaksin Adalah Upaya Pencegahan Terbaik*, <https://covid19.go.id/p/berita/protokol-kesehatan-yang-diperkuat-vaksin-adalah-upaya-pencegahan-terbaik> (diakses pada 17 Mei 2022)
- Teatrika Handiko, *Jokowi Ingatkan tentang 2 Kunci Pengendali Pandemi Covid-19*, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/jokowi-ingatkan-tentang-2-kunci-pengendali-pandemik-covid?page=all>. (diakses pada tanggal 16 Mei 2023)
- Tim detikcom, *Daftar Negara yang Lockdown karena Corona*, <https://news.detik.com/berita/d-4956298/daftar-negara-yang-lockdown-karena-corona> (diakses pada tanggal 24 Mei 2022)

- Tim detikcom, *Jurus Atasi Corona Selama Setahun: PSBB hingga PPKM*, <https://news.detik.com/berita/d-5477140/jurus-atasi-corona-selama-setahun-psbb-hingga-ppkm>. (diakses pada tanggal 24 Mei 2022)
- Tim detikcom, *Makna PPKM, Kepanjangan, hingga Aturannya*, <https://news.detik.com/berita/d-5640047/makna-ppkm-kepanjangan-hingga-aturannya> (diakses pada tanggal 25 Mei 2022)
- Tim Redaksi, *PPKM Seluruh Indonesia Berakhir Hari Ini!*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220523091202-4-340963/ppkm-seluruh-indonesia-berakhir-hari-ini> (diakses pada tanggal 24 Mei 2022)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan No. 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu No. 3 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 14 Tahun 2021 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Dan Penanganan Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Hari No. 3 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan No. 2 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Konawe Selatan

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rajang Lebong No. 4 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen No. 2 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No. 1 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Corona Virus Disease 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran Dan Dampak Corona Virus Disease 2019